

***POSITIVE ENVIRONMENTAL DEVIANTS* SEBAGAI TELADAN
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA**

Resti Meilani



**DEPARTEMEN
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOVEMBER 2023**

Judul artikel : *Positive Environmental Deviants* sebagai Teladan dalam Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia

Penulis : Resti Meilani

NIP : 197705142005012001

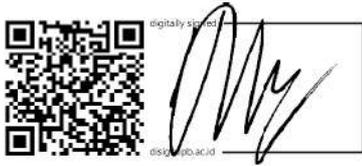
Bogor, 27 November 2023

Penulis

Mengetahui,

Ketua Departemen

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata



Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS.



Resti Meilani, S.Hut., M.Si.

Daftar Isi

Abstrak/Abstract	1
Pendahuluan	2
Konsep <i>positive deviance</i>	4
Bagaimana PLH dapat mengambil manfaat dari <i>positive deviance</i>	11
Tantangan dalam menggunakan konsep <i>positive deviance</i> dalam pengembangan PLH	13
Kesimpulan	15
Daftar Pustaka	16

POSITIVE ENVIRONMENTAL DEVIANTS SEBAGAI TELADAN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA¹

Resti Meilani

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor

Email: restimeilani@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan lingkungan hidup berkembang bagian dari upaya memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat menemukan solusi atas berbagai permasalahan lingkungan. Namun penyelenggaraan PLH di Indonesia terindikasi masih belum efektif melihat betapa masih banyaknya anggota masyarakat yang berperilaku negatif terhadap lingkungan, meskipun PLH telah diselenggarakan secara lebih luas dan didukung kebijakan nasional maupun daerah, sehingga diperlukan kurikulum PLH yang mampu mendorong terjadinya perubahan perilaku pada peserta didiknya. Pengembangan kurikulum PLH dapat mengambil manfaat dari keteladanan para *positive environmental deviants*. Tulisan ini membahas mengenai kemungkinan dan tantangan penggunaan konsep tersebut untuk pengembangan PLH.

Kata kunci: pendidikan lingkungan hidup/konservasi, *positive environmental deviants*, teladan

ABSTRACT

Environmental education (EE) is developed as part of the effort to provide citizens with the capability to solve environmental problems. However, the high number of people still carrying out activities adversely impacting the environment indicated the ineffectiveness of EE implementation in Indonesia, though EE has been widely implemented and supported by national policy and local regulation. Such a condition signifies the need to develop an EE curriculum that can encourage behavioural change and the adoption of more environmentally responsible behaviour by its learners. Curriculum development could take advantage of the role model from positive environmental deviants. This paper discusses the possibility of and challenges in using the concept of positive environmental deviance in developing EE.

Keywords: agency, environmental/conservation education, role

¹ Hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan, disimpan di perpustakaan IPB

Pendahuluan

Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) berkembang sebagai bagian dari upaya memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat menemukan solusi atas berbagai permasalahan lingkungan. Perkembangan PLH di Indonesia tidak terlepas dari tiga peristiwa dunia, yaitu:

- (1) Konferensi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Lingkungan Manusia di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm. Rekomendasi nomor 96 dalam deklarasi tersebut mencantumkan PLH sebagai salah satu cara untuk menangani permasalahan lingkungan global (United Nations, 1972).
- (2) Lokakarya Pendidikan Lingkungan Hidup Internasional di Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1975 yang menghasilkan Piagam Belgrade. Piagam tersebut mengajukan kerangka kerja PLH dengan tujuan untuk ‘mengembangkan populasi dunia yang sadar akan dan memiliki keprihatinan terhadap lingkungan dan berbagai permasalahan terkait, dan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara individu maupun bersama untuk mencari solusi permasalahan saat ini dan mencegah timbulnya permasalahan baru’ (UNESCO and UNEP, 1976, p.76).
- (3) Konferensi Antarpemerintah Pertama tentang Pendidikan Lingkungan Hidup di Tbilisi, Georgia pada tahun 1977 yang menghasilkan Deklarasi Tbilisi. Deklarasi tersebut menguraikan kerangka kerja, pedoman dan prinsip PLH yang telah direvisi (UNESCO & UNEP, 1978).

Hingga saat ini, PLH telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti Pendidikan konservasi dan Pendidikan untuk Pembangunan berkelanjutan. Kebijakan PLH di Indonesia menekankan pelaksanaan PLH pada ketiga jalur pendidikan yang diakui dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yaitu jalur pendidikan formal di sekolah, serta jalur pendidikan non-formal dan informal di luar sekolah. Kebijakan ini diikuti oleh pengembangan berbagai program PLH oleh daerah, seperti di Jawa Barat dengan peraturan gubernurnya yang menguatkan pelaksanaan PLH di sekolah dan pengembangan kurikulum PLH dan penyusunan buku pendukungnya di Papua Barat, serta berbagai kegiatan PLH yang dilakukan berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Sayangnya,

PLH yang telah dilaksanakan seolah tidak efektif, melihat masih sangat banyak anggota masyarakat yang memperlakukan lingkungan dengan cara yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Namun di sisi lain, bermunculan pula individu-individu yang berperilaku berbeda, menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, namun memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan. Sebagai contoh, para individu penerima penghargaan Kalpataru maupun mereka yang belum menerima penghargaan Kalpataru yang telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki lingkungan dengan melakukan berbagai aksi, seperti pembersihan lingkungan di darat maupun perairan dari sampah, penanaman area pesisir dengan bakau, pelestarian buah-buahan lokal, dan pelestarian tumbuhan obat tradisional, selama bertahun-tahun.

Para penyimpang positif yang disebut sebagai *positive deviant* (PD) atau dalam kaitannya dengan perbaikan lingkungan dapat disebut sebagai *positive environmental deviant* (PED) tersebut dapat menjadi teladan bagi anggota masyarakat lainnya untuk ikut berkomitmen dalam kegiatan-kegiatan perbaikan lingkungan. Kegiatan mereka yang menyimpang secara positif disebut sebagai *positive deviance*. Istilah *positive deviance* mengacu pada perilaku tidak biasa, yang berbeda dari perilaku anggota masyarakat lainnya, yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat tersebut, namun memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Para ilmuwan dalam bidang kesehatan dan gizi serta bidang kajian organisasi telah sering menggunakan konsep *positive deviance* (Lavine, 2012). Dadich, Collier, Hodgins, & Crawford (2018) menggunakan *positive deviance* dalam pengelolaan perawatan kesehatan, sedangkan Feng dan Bruhn (2016), Gabbay et al. (2013), dan Hendryx et al. (2017) menggunakannya dalam bidang kesehatan dan nutrisi. Beberapa ilmuwan lain seperti Abalo (2018) dan Marsh, Schroeder, Dearden, Sternin, dan Sternin (2004), telah memperkenalkan pendekatan *positive deviance* sebagai sebuah metode untuk merubah perilaku orang. Abalo (2018), misalnya, mengusulkan penggunaan pendekatan *positive deviance* untuk merubah perilaku untuk meningkatkan praktik sanitasi di Kampala City, Uganda, mengingat adanya rumah tangga di pemukiman kumuh di kota tersebut yang mempraktikkan sanitasi yang baik di rumahnya sehingga bisa menjadi teladan/*role model* bagi

anggota masyarakat lain di pemukiman tersebut yang umumnya tidak mempraktikkan sanitasi yang baik di rumah mereka. Marsh et al. (2004) menceritakan keberhasilan penggunaan pendekatan *positive deviance* dalam meningkatkan kesehatan anak di Vietnam dan Mesir.

Selain itu, terdapat pula beberapa kajian mengenai penggunaan *positive deviance* dalam pendidikan, yang mencakup kajian oleh Zaidi, Jaffery, & Moin (2010) dan Hill (2017). Zaidi et al. (2010) menggunakan pendekatan *positive deviance* untuk meningkatkan kinerja mahasiswa kedokteran di Pakistan, sedangkan Hill (2017) menggunakannya untuk menemukan sekolah-sekolah yang memiliki capaian siswa yang lebih tinggi diantara sekolah-sekolah lainnya di Alaska. Meskipun Hill (2017) tidak dapat menemukan *positive deviants* di sekolah-sekolah tersebut, namun Zaidi et al. (2010) mengamati adanya peningkatan yang cukup besar dalam keterampilan klinis dan sikap mahasiswa yang terlibat dalam intervensi *positive deviance*. Dengan demikian, ada peluang untuk menerapkan konsep *positive deviance* dalam PLH yang bertujuan untuk merubah perilaku menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Esai ini menyajikan kajian pustaka, khususnya terkait *positive deviance*, untuk membahas kemungkinan menggunakan para PED sebagai teladan/*role model* untuk pengembangan PLH di Indonesia yang lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan dan komitmen peserta didiknya untuk ikut serta dalam mencari penyelesaian atas permasalahan lingkungan.

Konsep *Positive Deviance*

Konsep *positive deviance* berkembang sebagai perluasan dari konsep *deviance*, yang didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial (Gibbs, 1981; Johnson, 2000; Palmisano, 2001; Craighead & Nemeroff, 2004; Jary & Jary, 2006) atau perilaku yang berbeda dari yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, yang umumnya diatur oleh norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Gibbs (1981, p. 4) mendefinisikan norma sebagai ‘suatu kepercayaan bersama dalam sebuah unit sosial mengenai perilaku yang harus dilakukan’. Dengan kata lain, norma mengandung serangkaian standar yang dijadikan

pegangan oleh suatu masyarakat tertentu, yang mengatur perilaku atau tindakan mereka. Berbeda dengan aturan formal, norma biasanya tidak tertulis.

Pada awalnya, *deviance* digunakan dalam bidang Sosiologi untuk menggambarkan perilaku negatif (Spreitzer & Sonenshein, 2003). Sebagian besar penelitian awal tentang *deviance* fokus pada aspek negatifnya (Spreitzer & Sonenshein, 2003; 2004). *Deviance* tidak diinginkan oleh masyarakat karena dampak negatifnya. Contohnya perilaku criminal atau perilaku membahayakan lainnya yang ditolak oleh masyarakat (Spreitzer & Sonenshein, 2003; Herington & van de Fliert, 2018). Raybeck (1988) menyebutkan bahwa masyarakat memberikan label pada individu sebagai *deviant* (seorang penyimpang) ketika mereka tidak lagi memiliki cara untuk melindungi unit sosialnya dari individu yang ‘secara aktif mengancam kesejahteraan orang lain (pencuri dan pembunuh)’ (p. 393) dan mengaburkan batasan antara *hard deviants* dan *soft deviants* (pengemis, penjudi). Spreitzer dan Sonenshein (2003) menyatakan bahwa orang yang menunjukkan perilaku menyimpang melakukannya dengan sebuah niatan dan tindakannya harus lebih dari perilaku minor untuk sekadar menarik perhatian orang lain. Namun demikian, perilaku menyimpang bisa saja terjadi pada orang-orang yang telah mempelajari ataupun mereka yang tidak familiar dengan norma dan nilai yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu (DeLamater, 1968). Mengacu pada pendapat DeLamater tersebut, asumsi bahwa para penyimpang memiliki pemahaman mengenai norma masyarakat yang dominan bisa menyesatkan. Karena itu, niat yang disebutkan oleh Spreitzer and Sonenshein semestinya dimaknai sebagai niatan untuk bertindak, dengan atau tanpa mengetahui apakah niatan tersebut melanggar norma atau tidak.

Berangkat dari konsepsi awal perilaku menyimpang, Spreitzer dan Sonenshein (2003) memperluas konsep tersebut mencakup *positive deviance* (penyimpangan positif) dan menawarkan definisi awal *positive deviance* menggunakan pendekatan normatif. Mereka mendefinisikannya sebagai “perilaku disengaja (*intentional*) yang menyimpang dengan cara terhormat (*honourable ways*) dari norma suatu kelompok’ (p. 209). Mereka menggunakan istilah ‘*honourable ways*’ untuk menggambarkan istilah positif. Definisi tersebut memberikan batasan bahwa perilaku harus disengaja/*intentional* dan dipandang

sebagai hal yang terhormat/*honourable* oleh anggota masyarakat lainnya, dan karenanya harus jelas agar orang lain dapat melihat dan membuat penilaian atas perilaku tersebut. Dengan demikian, *positive deviance* harus didasarkan pada bukti yang dapat diamati. Norma digunakan sebagai kriteria untuk membuat penilaian apakah suatu perilaku menyimpang atau tidak (Spreitzer & Sonenshein, 2004). Karena itu, sangat penting untuk memperjelas norma yang digunakan terlebih dahulu (Lavine, 2012). Namun demikian, Lavine (2012) berpendapat bahwa perilaku *positive deviance* tidak selalu *intentional*/disengaja, namun bisa juga terjadi 'secara tidak sengaja atau dimotivasi oleh insting untuk bertahan hidup atau melindungi diri' (p.13). Perkembangan gerakan keadilan lingkungan oleh para wanita yang dijelaskan dalam kajian oleh Verchick (1996) dapat menggambarkan insting bertahan hidup atau melindungi diri sebagai motivasi dari perilaku *positive deviance*. Dia menjelaskan bahwa 'para aktivis didorong oleh rasa kebutuhan untuk melindungi hidup dan hubungan personalnya' (Verchick, 1996, p. 88). Dengan alasan tersebut, maka perilaku penyimpangan positif bisa dilihat sebagai hal yang terhormat oleh orang lain namun juga bisa sebaliknya.

Perilaku menyimpang, baik positif maupun negatif, dipengaruhi oleh berbagai factor. Faktor psikologis (DeLamater, 1968; Spreitzer & Sonenshein, 2003) dan kontekstual (Spreitzer & Sonenshein, 2003) dapat berpengaruh dalam mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Spreitzer dan Sonenshein (2003) mengajukan lima faktor psikologis yang dapat mendorong terjadinya penyimpangan positif, yaitu 'rasa kebermaknaan, fokus pada orang lain, determinasi diri, efikasi diri dan keberanian'. Mereka juga menyampaikan bahwa '*transformational leadership* dan *context of crisis*' juga dapat membantu dalam membentuk penyimpangan positif. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasa kebermaknaan (*sense of meaning*): saat suatu perilaku tertentu memiliki makna untuk individu, maka hal tersebut dapat memberi mereka suatu alasan untuk mengambil resiko bagi diriya dengan menunjukkan perilaku yang melanggar norma masyarakat di tempatnya tinggal. Rasa kebermaknaan memberikan seorang individu motivasi intrinsik yang mungkin bertahan lebih lama daripada motivasi eksternal.

2. Fokus pada orang lain berarti bahwa individu tersebut mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan orang lain. Empati, yang didefinisikan dalam kamus daring Oxford English Dictionary (2014) sebagai ‘kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan, pengalaman dan sebagainya dari orang lain’ dapat berkontribusi dalam membuat seseorang menempatkan orang lain dalam pertimbangan mereka.
3. Determinasi diri bermakna bahwa orang melihat diri mereka memiliki kendali atas nasibnya, dan bahwa mereka memiliki kebebasan dalam hidup dan kebebasan untuk memilih.
4. Efikasi diri berkaitan dengan kepercayaan diri. Merasa berhasil bermakna bahwa individu memandang diri mereka memiliki kompetensi untuk mencapai tujuan mereka. Rasa tersebut memotivasi mereka untuk menetapkan tujuan yang ambisius, memperkuat komitmen mereka untuk mencapai tujuan, membantu mereka berpikir dengan cara yang berbeda, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk berperilaku menyimpang secara positif.
5. Keberanian didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai keadaan berani, yaitu keadaan saat seseorang memiliki hati yang mantap dan kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. Individu perlu memiliki keberanian untuk dapat mencapai sesuatu yang berbeda dari orang lain. Keberanian memberikan dorongan bagi individu untuk mengambil resiko menjadi berbeda dan keluar dari zona amannya.
6. *Transformational leadership*: Para pemimpin transformasional memiliki keberanian untuk menghadapi resiko dari tindakan tidak biasa yang mereka lakukan dengan menantang aturan dan arahan.
7. *Context of crisis/konteks krisis*: Krisis, yang timbul dari ancaman serius terhadap individu dan/atau organisasi, dapat meringankan pembatas yang ditimbulkan oleh aturan dan prosedur, sehingga mendorong terjadinya perilaku menyimpang.

Kajian yang dilakukan oleh Williamson telah mendemonstrasikan bahwa terlepas dari konteks krisis yang berada di luar cakupan studinya, para pemimpin dengan penyimpangan positif menghargai rasa kebermaknaan, fokus pada orang lain, determinasi diri, efikasi diri, dan keberanian (Williamson, 2016). Dalam kaitan

dengan efikasi diri, Eden (1993) menyampaikan bahwa individu yang percaya bahwa perilaku positifnya terhadap lingkungan memiliki kekuatan untuk memengaruhi lingkungannya, akan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan. Namun demikian, pendapatan yang terbatas memberikan hambatan bagi individu dan kelompok dalam mengubah tanggung jawab lingkungannya menjadi perilaku pro-lingkungan dalam konteks yang spesifik, terutama dalam masa perekonomian yang buruk (Eden, 1993). Selama masa perekonomian yang buruk, orang mungkin lebih memilih untuk mengalokasikan pendapatannya untuk hal-hal selain biaya untuk menerapkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Persepsi budaya tertentu mungkin menempatkan perilaku pro-lingkungan sebagai hal yang eksentrik dan konyol, sehingga anggota masyarakatnya tidak ingin menempatkan diri dalam posisi tersebut dengan melibatkan diri mereka dalam perilaku pro-lingkungan tersebut (Eden, 1993). Kajian Nagel (2005) menunjukkan bahwa paparan terhadap masalah lingkungan yang sangat merusak pada usia muda, saat anak-anak tidak memiliki keterampilan kritis dan analisis yang memadai untuk memahami informasi yang diterimanya, menumbuhkan rasa ketidakberdayaan (*sense of hopelessness*) dan mengarahkan mereka untuk membentuk apati terhadap kemampuannya untuk melakukan sesuatu untuk lingkungannya. Rasa tidak berdaya (*learned hopelessness*) dan apati ini dapat menghalangi terbentuknya perilaku pro-lingkungan. Rasa ketidakberdayaan ini juga dapat dialami oleh individu dewasa yang merasa tidak mampu bertindak karena masalah lingkungan dirasa terlalu besar dan karena adanya kekuasaan dan modal besar yang bertentangan dengan upaya perbaikan lingkungan tersebut.

Penilaian resiko dan resiko yang dirasakan seseorang juga dapat berkontribusi dalam mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Orang akan berpaling pada logika budaya dan pengalaman sosialnya di masa lalu saat mereka menduga bahwa suatu penilaian resiko yang diberikan oleh suatu Perusahaan atau organisasi atau Lembaga pemerintahan tertentu tidak penting atau tidak benar (Fischer, 2005). Verchick (1996) menjelaskan kondisi serupa dalam hasil kajiannya. Ia mengungkapkan bahwa lelaki kulit putih memiliki persepsi bahwa bahaya mempunyai resiko yang lebih rendah

dan dapat diterima daripada resiko yang dilihat oleh perempuan kulit putih ataupun lelaki dan perempuan non-kulit putih. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan lingkungan yang dikembangkan berdasarkan penilaian resiko yang dilakukan oleh lelaki kulit putih bias dan tidak menguntungkan perempuan kulit putih serta lelaki dan perempuan non-kulit putih (Verchick, 1996). Pandangan terhadap resiko yang lebih tinggi diantara perempuan kulit putih serta perempuan dan lelaki non-kulit putih berkontribusi pada pertumbuhan pergerakan akar rumput untuk memperjuangkan keadilan lingkungan. Resiko yang dirasakan individu juga memengaruhi keputusan individu untuk melibatkan diri dalam perilaku yang lebih bertanggung jawab, seperti pertanian organik (Toma & Mathijs, 2007) dan tindakan hemat energi (Poortinga, Steg, & Vlek, 2002). Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa orang-orang dengan persepsi resiko lebih rendah terhadap suatu situasi cenderung berpaling dari perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Penggunaan *positive deviance*

Konsep *positive deviance* pertama kali digunakan dalam bidang kesehatan dan gizi (Lavine, 2012) dan digunakan secara luas dalam penelitian mengenai kelangsungan hidup anak (Marsh *et al.*, 2004). Dalam bidang kesehatan dan gizi, para penyimpang positif mengacu pada mereka yang telah mencapai kesehatan yang luar biasa diantara orang lainnya yang memiliki sumberdaya yang sama. Dalam kajian organisasi/manajemen, penyimpang positif terkait dengan mereka yang pencapaiannya lebih tinggi dengan melakukan hal yang berbeda dari orang lain, seperti menghabiskan lebih banyak waktu dari seharusnya atau memberikan perhatian lebih pada kebutuhan pegawai.

Pendekatan *positive deviance* adalah suatu proses yang membantu masyarakat untuk belajar dari perilaku positif anggota masyarakatnya dan merangkul perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya (Lavine, 2012). Perubahan perilaku tersebut diharapkan dapat berkelanjutan karena perilaku tersebut sudah ditunjukkan oleh beberapa anggota masyarakat lokal yang menghadapi resiko yang sama dan memiliki sumberdaya yang sama dengan anggota masyarakat lainnya (Marsh *et al.*, 2004). Karena itu, perilaku positif harus dapat dicapai karena dapat diikuti oleh anggota masyarakat lainnya.

Marsh *et al.* (2004) menggunakan pendekatan *positive deviance* dalam program gizi anak di Mesir, dan telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kesehatan anak. Kajian ini dilakukan dalam masyarakat miskin yang anak-anaknya mengalami ketidakcukupan gizi. Berlawanan dengan praktik yang umum dilakukan pada masyarakat tersebut, ada orangtua yang memiliki anak-anak dengan gizi baik karena mereka memberi makan anak mereka dengan makanan yang mencakup telur, biji-bijian dan sayuran hijau. Mengacu pada keluarga-keluarga tersebut, Marsh *et al.* (2004) mengembangkan suatu program yang memungkinkan para orangtua dengan anak bergizi buruk untuk mengikuti perilaku gizi dan perilaku lainnya seperti mencuci tangan dan menyiapkan makanan secara higienis. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan anak. Pendekatan *positive deviance* juga telah mampu mengidentifikasi tempat-tempat dengan luaran kesehatan yang baik yang dapat digunakan sebagai model untuk menemukan cara paling efektif untuk mencapai tujuan dalam suatu kondisi yang tidak menguntungkan (Hendryx *et al.*, 2017), misalnya untuk meningkatkan perawatan diabetes pada suatu fasilitas kesehatan (Gabbay *et al.*, 2013).

Penggunaan konsep *positive deviance* semakin meluas dalam bidang di luar kesehatan dan gizi (Marsh *et al.*, 2004). Telah ada beberapa kajian mengenai penggunaan *positive deviants* dalam kaitannya dengan lingkungan dan pendidikan. Dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan, Hoffman dan Haigh (2012) menyampaikan bahwa *positive deviance* dapat digunakan untuk mencapai dunia yang berkelanjutan, dengan ‘semakin bertambahnya jumlah individu dan organisasi yang telah memulai untuk mengubah gaya hidup dan model bisnisnya untuk menerapkan visi keberlanjutannya’ (p. 5). Individu dengan perilaku penyimpanan yang positif dapat berperan sebagai teladan/*role model* bagi orang lain untuk mempelajari dan mengadopsi perilaku serupa untuk mencapai dunia yang berkelanjutan. Dalam konservasi lingkungan, istilah ‘*bright spots*’ (Cinner *et al.*, 2016) dan ‘*exceptional responders*’ (Post & Geldmann, 2018) memberikan konsep serupa dengan *positive deviants*. *Bright spots* dan *exceptional responders* keduanya didefinisikan sebagai ‘pencilan/*outliers*’ positif, yang bekerja untuk memperbaiki ekosistem (Cinner *et al.*, 2016) atau yang memberikan respons lebih baik terhadap kondisi tertentu (Post & Geldmann, 2018). Konsep *bright spots* mengacu pada

ekosistem terumbu karang, sedangkan konsep *exceptional responders* mengacu pada non-manusia dan manusia. Namun demikian, dengan mengidentifikasi *bright spots* atau *exceptional responders* diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi, yang lebih lanjut dapat membantu mendesain tindakan untuk mengkonservasi alam.

Beberapa kajian telah menunjukkan bahwa pendekatan *positive deviance* dapat membantu dalam pendidikan. Kwitonda dan Singhal (2018) berpendapat bahwa mengintegrasikan pendekatan *positive deviance* ke dalam kurikulum dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar dalam komunikasi. Lebih lanjut keduanya menjelaskan bahwa ‘pedagogi seputar pendekatan PD dapat menciptakan kondisi bagi pembelajar untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai cara operasi kognisi, dan memberikan hasil pembelajaran global seperti penerapan pengetahuan, penghargaan terhadap keragaman budaya, pentingnya mengambil perspektif tertentu, dan efikasi diri dalam memulai perubahan sosial dan perilaku lintas budaya’ (Kwitonda & Singhal, 2018, p. 1). Contoh lainnya berasal dari pendidikan tentang keamanan pangan: sebuah modul diskusi yang dikembangkan dari hasil diskusi dengan perempuan hamil dengan diabetes yang memiliki penyimpangan perilaku positif dapat menyediakan alternatif potensial dalam mendidik orang mengenai keamanan pangan (Feng & Bruhn, 2016). Mahasiswa yang terlibat dalam praktik penyimpangan positif di perguruan tinggi kedokteran di Pakistan menunjukkan adanya peningkatan kinerja (Zaidi *et al.*, 2010).

Bagaimana PLH dapat mengambil manfaat dari *positive deviance*

Herrington dan van de Fliert (2018) percaya bahwa ‘*positive deviance* dalam teori dan praktik dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami hakikat perubahan sosial dan mengatasi banyak permasalahan sosial rumit yang dihadapi masyarakat di abad duapuluh satu’. PLH berupaya merubah perilaku orang menjadi perilaku yang lebih ramah lingkungan (atau pro-lingkungan). PLH melibatkan perubahan sosial, karena masalah lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat, tidak hanya individu atau organisasi tertentu.

Mempelajari para individu dengan penyimpangan positif dalam perilaku terkait lingkungan (*positive environmental deviants*) atau individu yang memiliki

perilaku pro-lingkungan dapat membantu mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi atau membuat individu tersebut melibatkan diri dalam kegiatan yang menyimpang secara positif. Faktor-faktor tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan lingkungan belajar yang dapat memotivasi peserta didik untuk mengadopsi perilaku positif tersebut dan lebih lanjut menciptakan lebih banyak *positive environmental deviants*. Pendekatan *positive deviance* bermanfaat untuk mencapai tujuan tersebut. Marsh *et al.* (2004) menyampaikan bahwa pendekatan *positive deviance* dilakukan dengan cara:

- 1) menentukan kasus;
- 2) mengidentifikasi anggota masyarakat yang menunjukkan capaian yang lebih baik meskipun mengalami resiko dan memiliki sumberdaya yang sama dengan anggota masyarakat lainnya;
- 3) menemukan perilaku yang memberikan hasil yang baik tersebut;
- 4) memastikan bahwa perilaku tersebut berbeda dengan praktik pada umumnya dan bahwa perilaku tersebut dapat ditiru oleh anggota masyarakat lainnya;
- 5) mendesain kegiatan untuk mendorong adopsi perilaku baru tersebut dan dengan demikian mendorong terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat lebih luas.

Pendekatan semacam itu dapat dipandang sebagai suatu *action research* yang melibatkan identifikasi faktor yang berpengaruh, desain aktivitas, implementasinya, dan kemudian evaluasi efektivitas dari kegiatan tersebut. Selain mengidentifikasi perilaku atau praktik yang umum dilakukan, untuk dapat menentukan bahwa suatu perilaku menyimpang diperlukan pula identifikasi terhadap pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan penyimpangan terhadap praktik tersebut dan menerapkan sanksi terhadap para penyimpang. Selain itu, identifikasi sumber gagasan para PED tersebut untuk berperilaku positif akan membantu dalam pengembangan PLH.

Penelitian akan selalu melibatkan pertanyaan mengenai metodologi. Mengacu pada Marsh *et al.* (2004), baik wawancara maupun observasi diperlukan dalam melakukan penelitian *positive deviance*. Triangulasi penting, dan karenanya wawancara dengan informan kunci, dokumen pendukung dan observasi langsung dibutuhkan (Rose & McCullough, 2017). Namun demikian, triangulasi juga dapat

dicapai dengan memperoleh sudut pandang berbeda, seperti misalnya dari individu pada level manajemen atau tanggung jawab berbeda dalam suatu organisasi, atau individu dengan status sosial berbeda di masyarakat. Rose dan McCullough (2017) juga menyarankan penggunaan *mixed methods* (dengan pendekatan kualitatif sebagai bagian yang dominan) dan melibatkan responden dari berbagai posisi dan tanggung jawab berbeda. Penentuan kelompok sasaran dan jumlah responden yang perlu diwawancarai sangat tergantung pada konteks penelitian.

Tantangan dalam menggunakan konsep *positive deviance* dalam pengembangan PLH

Pendekatan *positive deviance* dapat membantu dalam mengembangkan PLH yang lebih baik. Namun demikian, penerapan konsep *positive deviance* tersebut dalam PLH tidak terlepas dari berbagai tantangan. Setidaknya ada tiga tantangan dalam menerapkan konsep tersebut, yaitu menentukan norma dan menentukan pihak yang memiliki kuasa untuk menetapkan dan menegakkan norma dan memberikan atribusi penyimpangan, menentukan kelompok yang memberikan label positif, serta memperluas praktik pro-lingkungan individu menjadi Gerakan lingkungan yang lebih besar.

Pertama, dalam menggunakan konsep tersebut perlu ditentukan norma yang digunakan sebagai standar dalam mengevaluasi apakah suatu perilaku menyimpang atau tidak, dan kelompok/masyarakat mana yang memegang norma tersebut. Suatu perilaku dapat dipandang positif oleh suatu kelompok namun dipandang sebaliknya oleh kelompok lainnya. Konservasi orangutan, gajah dan berbagai hidupan liar lainnya memberikan contoh yang baik untuk hal ini. Dari sudut pandang pegiat lingkungan, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan konservasi satwa tersebut dipandang memiliki perilaku yang positif, sedangkan dari sudut pandang orang-orang yang memperoleh dampak negatif dari keberadaan satwa tersebut, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai hal yang negatif. Jadi, norma yang mana dan dari kelompok yang mana yang harus digunakan dalam menentukan penyimpangan positif? Dalam kaitannya dengan lingkungan, tentunya perilaku tersebut perlu memiliki nilai positif terhadap lingkungan. Karenanya, dalam menentukan hal yang positif terhadap lingkungan, eksplorasi terhadap perspektif konservasi, etika

lingkungan dan hak alam perlu dilakukan. Namun demikian, perlu dilihat juga bahwa perilaku yang dinilai sebagai hal yang menyimpang terhadap norma yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat bukanlah perilaku yang umum dilakukan di masyarakat tersebut. Dengan demikian, *positive environmental deviance* dapat dilihat sebagai hal yang positif baik dari perspektif lingkungan maupun masyarakat, atau positif dari perspektif lingkungan namun negatif dari perspektif masyarakat, terutama pada masyarakat dengan kepentingan yang bertentangan antara lingkungan dan kebutuhan anggota masyarakatnya.

Kedua, konsep *positive deviance* fokus pada individu. Dalam konteks lingkungan, perubahan dari perilaku yang kurang ramah lingkungan menjadi lebih ramah lingkungan mungkin lebih sulit dicapai daripada dalam bidang gizi dan kesehatan, karena dampaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang dan manfaatnya mungkin tidak dapat langsung dirasakan secara nyata bagi mereka yang terlibat dalam perubahan perilaku tersebut. Masa tunggu yang lama seperti itu bisa membuat orang frustrasi dan berkecil hati untuk mempertahankan perilaku ramah lingkungannya yang baru tersebut, terutama karena perilaku tersebut dipandang aneh oleh kebanyakan anggota masyarakat lainnya. Eden (1993) telah menunjukkan bahwa persepsi budaya semacam itu berperan sebagai pembatas atau penghambat dalam menciptakan perilaku pro-lingkungan yang konsisten. Mempertimbangkan kajian Eden, perubahan budaya diinginkan untuk mengubah tindakan pro-lingkungan individu menjadi aksi kolektif. Diharapkan bahwa 'semakin banyak orang berperilaku bertanggung jawab akan mendorong semakin banyak orang untuk melihat perilaku tersebut sebagai suatu arus utama atau hal yang umum dan ikut serta di dalamnya' (Eden, 1993, p. 1755). Hal ini berarti bahwa perilaku tersebut telah membentuk norma yang baru dan tidak lagi dipandang sebagai suatu penyimpangan. Namun demikian, realitasnya tidak sesederhana itu.

Betul bahwa individu PED dapat memberikan suatu contoh, menjadi teladan/*role model* bagi orang lain untuk mengikutinya. Namun demikian, orang perlu difasilitasi untuk bergabung dalam gerakan yang tidak umum di masyarakatnya. Media, politik, dan peraturan perundangan bisa menjadi jawaban dalam membuat perilaku pro-lingkungan menjadi hal yang umum di masyarakat luas. Mengubah suatu isu menjadi isu politik dapat menarik publik (Hird,

Lougheed, Rowe, & Kuyvenhoven, 2014), sedangkan aturan legal dapat memaksakan perubahan perilaku pada berbagai kelompok berbeda (Eden, 1993). Namun demikian, penegakan hukum harus sejalan dengan pertimbangan ekonomi, sehingga dapat mengurangi beban bagi anggota masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah. Melibatkan tokoh agama berpengaruh dalam pendidikan konservasi telah terbukti efektif dalam kegiatan konservasi jangka pendek dan panjang di Western Karakorum, Pakistan, karena membantu masyarakat untuk memperoleh perasaan bahwa pengetahuan mereka berharga sehingga dapat memberikan keberdayaan bagi mereka (Sheikh, 2006). PLH yang dipadukan dengan ajaran agama juga dapat menjadi alternatif dalam mengubah rasa tanggung jawab lingkungan (*environmentalism*) individu menjadi rasa tanggung jawab lingkungan kolektif, terutama saat kompetensi religius merupakan hal yang dominan dalam kurikulum (Parker, 2017). Meskipun situasinya beragam, nilai-nilai agama dapat memengaruhi penilaian mengenai ancaman terhadap lingkungan, dan karenanya dapat membentuk kepedulian dalam kaitannya dengan nilai lingkungan tersebut (Biel & Nilsson, 2005).

Kesimpulan

Pendekatan *positive deviance* telah terbukti berguna dalam mengubah perilaku masyarakat. Karenanya, pengembangan kurikulum PLH dapat mengambil manfaat dari pendekatan ini. Pengembangan kurikulum diharapkan menjadi norma baru yang akan menjadi norma umum, sehingga di masa mendatang perilaku tersebut tidak lagi dipandang menjadi suatu hal yang menyimpang. Namun demikian, metode yang paling sesuai untuk mengembangkan *positive deviance* masih dipertanyakan dan diperlukan lebih banyak telaah terhadap penelitian yang ada.

Tantangan utama penggunaan pendekatan *positive deviance* untuk pengembangan PLH adalah dalam menentukan norma yang digunakan sebagai standar oleh kelompok yang menjadi referensi, menetapkan unit analisis (masyarakat yang mana, ukuran unit contoh, dsb), serta bagaimana memperluas perubahan perilaku dari individu menjadi tindakan kolektif, memperkenalkan perilaku tersebut sebagai norma baru sehingga tidak lagi dipandang sebagai suatu

penyimpangan. Tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk hal terakhir meliputi (1) mengangkat isu perubahan perilaku tersebut dalam kancah politik dan menegakkan aturan hukum, (2) melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh, terutama tokoh agama, dan (3) mengembangkan kurikulum PLH yang bernafaskan keagamaan. Paradoks dalam konsep *positive deviance* adalah bahwa konsep tersebut digunakan untuk membangun suatu norma baru sehingga suatu perilaku tidak lagi dinilai menyimpang dan kemudian bahkan dipandang mendukung norma yang baru tersebut.

Daftar Pustaka

- Abalo, J. (2018). The Positive Deviance Approach as a Behavior Change Strategy for Promoting Sustainable Sanitation Practices Including Eliminating Open Defecation. In *Handbook of Research on Urban Governance and Management in the Developing World* (pp. 380–392). <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-4165-3.ch021>
- Biel, A., & Nilsson, A. (2005). Religious values and environmental concern: Harmony and detachment. *Social Science Quarterly*, *86*(1), 178–191. <https://doi.org/10.1111/j.0038-4941.2005.00297.x>
- Cinner, J. E., Huchery, C., MacNeil, M. A., Graham, N. A. J., McClanahan, T. R., Maina, J., ... Mouillot, D. (2016). Bright spots among the world's coral reefs. *Nature*, *535*(7612), 416–419. <https://doi.org/10.1038/nature18607>
- Craighead, W. E., & Nemeroff, C. B. (2004). Deviance. In *The concise Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science* (3rd Editio). Hoboken, NJ: Wiley.
- Dadich, A., Collier, A., Hodgins, M., & Crawford, G. (2018). Using Positive Organizational Scholarship in Healthcare and Video Reflexive Ethnography to Examine Positive Deviance to New Public Management in Healthcare. *Qualitative Health Research*, *28*(8), 1203–1216. <https://doi.org/10.1177/1049732318759492>
- DeLamater, J. (1968). On the nature of deviance. *Social Forces*, *46*(4), 445–455.
- Eden, S. E. (1993). Individual environmental responsibility and its role in public environmentalism. *Environment and Planning A*, *25*(12), 1743–1758.
- Feng, Y., & Bruhn, C. (2016). Food safety education for people with diabetes and pregnant women: A positive deviance approach. *Food Control*, *66*, 107–115. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.01.039>
- Fischer, F. (2005). Are scientist irrational? Risk assessment in practical reason. In M. Leach, I. Scoones, & B. Wynne (Eds.), *Science and citizens: Globalization and the challenge of engagement* (pp. 54–65). London: Zed Books. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/10.2307/20058719?origin=crossref>

- Gabbay, R. A., Friedberg, M. W., Miller-Day, M., Cronholm, P. F., Adelman, A., & Schneider, E. C. (2013). A Positive Deviance Approach to Understanding Key Features to Improving Diabetes Care in the Medical Home. *The Annals of Family Medicine*, *11*(Suppl_1), S99–S107. <https://doi.org/10.1370/afn.1473>
- Gibbs, J. P. (1981). *Norms, deviance, and social control: Conceptual matters*. New York: Elsevier.
- Hendryx, M., Guerra-Reyes, L., Holland, B. D., McGinnis, M. D., Meanwell, E., Middlestadt, S. E., & Yoder, K. M. (2017). A county-level cross-sectional analysis of positive deviance to assess multiple population health outcomes in Indiana. *BMJ Open*, *7*(10). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017370>
- Herington, M. J., & van de Fliert, E. (2018). Positive Deviance in Theory and Practice: A Conceptual Review. *Deviant Behavior*, *39*(5), 664–678. <https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1286194>
- Hill, M. M. (2017). *Schools in Rural Alaska with Higher Rates of Students Achievement: A Search for Positive Deviance in Education*. University of Alaska Fairbanks.
- Hird, M. J., Loughheed, S., Rowe, R. K., & Kuyvenhoven, C. (2014). Making waste management public (or falling back to sleep). *Social Studies of Science*, *44*(3), 441–465. <https://doi.org/10.1177/0306312713518835>
- Hoffman, A. J., & Haigh, N. (2012). Positive Deviance for a Sustainable World: Linking Sustainability and Positive Organizational Scholarship. *The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship*, (October 2018), 1–22. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199734610.013.0072>
- Jary, D., & Jary, J. (2006). Deviance. In *Collins dictionary of sociology* (4th Editio). London, UK: Collins.
- Johnson, A. G. (2000). Deviance. In *The Blackwell dictionary of sociology* (2nd Editio). Oxford, UK: Blackwell Publishers.
- Kwitonda, J. C., & Singhal, A. (2018). Teaching and Learning About Positive Deviance: Boosting Metacognition to Grasp Global Communication Theory and Practice. *Journal of Intercultural Communication Research*, *5759*, 1–10. <https://doi.org/10.1080/17475759.2018.1475295>
- Lavine, M. (2012). Positive Deviance: A Metaphor and Method for Learning from the Uncommon. *The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship*, (October 2018), 1–23. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199734610.013.0077>
- Marsh, D. R., Schroeder, D. G., Dearden, K. A., Sternin, J., & Sternin, M. (2004). The power of positive deviance. *BMJ*, *329*(7475), 1177–1179. <https://doi.org/10.1136/bmj.329.7475.1177>
- Nagel, M. (2005). Constructing apathy: How environmentalism and environmental education may be fostering “learned hopelessness” in children. *Australian Journal of Environmental Education*, *21*(1), 71–80. <https://doi.org/10.1017/S0814062600000963>

- Oxford English Dictionary. (2014). Empathy. In *Oxford English Dictionary: The definitive record of the English language* (Third Edit). Oxford University Pers. Retrieved from <http://www.oed.com/view/Entry/61284?redirectedFrom=empathy&print>
- Palmisano, J. M. (2001). Deviance. In *World of sociology*, Gale. Farmington, MI: Gale. Retrieved from <http://ezproxy.library.uwa.edu.au/login/login?qurl=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2Fworldsocs%2Fdeviance%2F0%3FinstitutionId%3D1571>
- Parker, L. (2017). Religious environmental education? The new school curriculum in Indonesia. *Environmental Education Research*, 23(9), 1249–1272. <https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1150425>
- Poortinga, W., Steg, L., & Vlek, C. (2002). Environmental risk concern and preferences for energy-saving measures. *Environment and Behavior*, 34(4), 455–478. <https://doi.org/10.1177/00116502034004003>
- Post, G., & Geldmann, J. (2018). Exceptional responders in conservation. *Conservation Biology*, 32(3), 576–583. <https://doi.org/10.1111/cobi.13006>
- Raybeck, D. (1988). Anthropology and Labeling Theory: A Constructive Critique. *Ethos*, 16(4), 371–397. <https://doi.org/10.1525/eth.1988.16.4.02a00020>
- Rose, A. J., & McCullough, M. B. (2017). A Practical Guide to Using the Positive Deviance Method in Health Services Research. *Health Services Research*, 52(3), 1207–1222. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12524>
- Sadler-Smith, E. (2015). Communicating Climate Change Risk and Enabling Pro-Environmental Behavioral Change Through Human Resource Development. *Advances in Developing Human Resources*, 17(4), 442–459. <https://doi.org/10.1177/1523422315601087>
- Sheikh, K. M. (2006). Involving Religious Leaders in Conservation Education in the Western Karakorum, Pakistan. *Mountain Research and Development*, 26(4), 319–322. <https://doi.org/10.1659>
- Spreitzer, G. M., & Sonenshein, S. (2003). Positive Deviance and Extraordinary Organizing. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. . Quinn (Eds.), *Positive Organizational Scholarship* (pp. 207–224). San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Spreitzer, G. M., & Sonenshein, S. (2004). Toward the Construct Definition of Positive Deviance. *American Behavioral Scientist*, 47(6), 828–847. <https://doi.org/10.1177/0002764203260212>
- Toma, L., & Mathijs, E. (2007). Environmental risk perception, environmental concern and propensity to participate in organic farming programmes. *Journal of Environmental Management*, 83(2), 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.02.004>
- UNESCO, & UNEP. (1976). The Belgrade Charter: A global framework for environmental education. *Connect, UNESCO-UNEP Environmental Education Newsletter*. Paris: UNESCO. Retrieved from

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000153391?posInSet=5&queryId=67afec66-6b5a-4e2b-b080-3c474ea964f0>

UNESCO, & UNEP. (1978). The Tbilisi Declaration. *Connect, UNESCO-UNEP Environmental Education Newsletter*. Paris: UNESCO. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001563/156393eb.pdf>

United Nations. (1972). *Report of the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm, 5-16 June 1972*. Stockholm. Retrieved from <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf>

Verchick, R. R. M. (1996). In a greener voice: Feminist theory and environmental justice. *Harv. Women's L.J.*, 19, 23–88.

Williamson, B. (2016). Internal Factors That Enable Positive Deviance to Occur in Leaders: A Phenomenological Description Submitted to Regent University School of Business & Leadership In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Organiz, 96.

Zaidi, Z., Jaffery, T., & Moin, S. (2010). Using positive deviance to improve student performance. *Medical Education*, 44, 495.